

Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Ukraina: Suksesi Proyek Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW) 2022

Hadidah Sallimi¹, Ali Muhammad²

Submitted: March 1, 2023; Revised: Januari 28, 2024; Accepted: July 17, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi dari organisasi masyarakat sipil Ukraina pada proyek Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW) yang dijalankan bersama Dewan Uni Eropa. COVAW didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas serta membentuk kerangka kerja legislatif Ukraina terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan domestik. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Transnational Advocacy Networks, untuk mengungkap strategi yang diupayakan oleh JurFem, La Strada-Ukraine, Centre of Women's Perspectives, Faith, Hope, Love yang bergerak sebagai organisasi masyarakat sipil asal Ukraina. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa *library research* serta menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui strategi advokasi yang digalakkan oleh organisasi masyarakat sipil Ukraina bersama Dewan Uni Eropa sukses dalam mendorong Pemerintahan Ukraina untuk meratifikasi Konvensi Istanbul serta meningkatkan *awareness* masyarakat luas atas isu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Ukraina.

Kata kunci: *Organisasi Masyarakat Sipil; Kekerasan Berbasis Gender; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konvensi Istanbul; Jaringan Advokasi Transnasional*

Abstract

This study aims to explain the methods developed by Ukrainian civil society organizations on the Council of the European Union-funded Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW) project. COVAW was established with the primary purpose of promoting public awareness and establishing a legal framework in Ukraine for the prevention of violence against women and domestic abuse. Using the theoretical framework of Transnational Advocacy Networks, this study reveals the strategies employed by the Ukrainian civil society organization to the project. The method of research employed is qualitative, with data collection techniques consisting of library research and data sources consisting of secondary data. The findings of this research show that Ukrainian civil society organizations and the European Union Council were successful in persuading the Ukrainian government to ratify the Istanbul Convention and in raising public awareness of the issue of violence against women in Ukraine through a strategy of advocacy.

Key words: *Civil Society Organizations; Gender Based Violence; Domestic Violence; Istanbul Convention; Transnational Advocacy Networks*

Pendahuluan

Proyek COVAW (2022) sejatinya dirancang sesuai dengan Rencana Aksi Dewan Eropa untuk Ukraina (2018-2022), dengan tujuan utama untuk memberikan dukungan terhadap reformasi legislatif dan kebijakan nasional Ukraina, terkait dengan perang melawan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan kesadaran (*raising awareness*) akan Konvensi Istanbul dan kekerasan terhadap perempuan di kalangan otoritas Ukraina dan masyarakat umum (Council of Europe, n.d.-b). Peningkatan kesadaran dan kerangka legislatif adalah dua komponen utama COVAW dalam rangka memberi Ukraina dukungan ganda dalam rangka untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan kriteria Konvensi Istanbul.

Dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan memang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat Ukraina khususnya bagi perempuan, yang mana adalah objek yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Masalah kekerasan terhadap perempuan, menurut perkiraan OSCE dan United Nations Development Programme (UNDP), tersebar luas di seluruh Ukraina, terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah terjadi konflik Ukraina – Rusia, yakni di Ukraina bagian Timur (Amnesty International, 2020; Zorgdrager, 2020). Amnesty Internasional mencatat, terdapat lonjakan kasus yang terdaftar dalam laporan resmi pada tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2018, terjadi peningkatan 76% kasus yang dilaporkan di wilayah Donetsk

dan peningkatan 158% di wilayah Luhansk, dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (Amnesty International, 2020). Keadaan ini tentu diperburuk dengan terjadinya COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

Diratifikasinya Konvensi Istanbul (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga) oleh Ukraina menjadi satu dari dua tujuan yang ingin dicapai oleh proyek COVAW. Konvensi Istanbul dinilai sangat krusial dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan secara berkelanjutan. Dengan mengadaptasi Konvensi Istanbul, tentu kekerasan seksual yang terjadi di Ukraina diharapkan dapat berkurang. Selain itu, penyebaran informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat secara luas juga menjadi poin penting yang ingin diraih pada proyek ini. Maka dari itu, Dewan Uni Eropa bersama dengan organisasi masyarakat sipil Ukraina, yakni berupa JurFem, La Strada-Ukraine, Centre of Women's Perspectives, Faith, Hope, Love melakukan berbagai strategi advokasi dalam menjalankan proyek tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi masyarakat sipil asal Ukraina yang terlibat dalam proyek COVAW. Penelitian ini akan membawa kebaruan dengan mengangkat peran dari organisasi masyarakat sipil tersebut, dikarenakan studi terkait dengan isu COVAW di Ukraina, khususnya pada partisipasi organisasi masyarakat sipil masih lah minim. Lebih lanjut, data artikel yang terindeks di Scopus dan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan

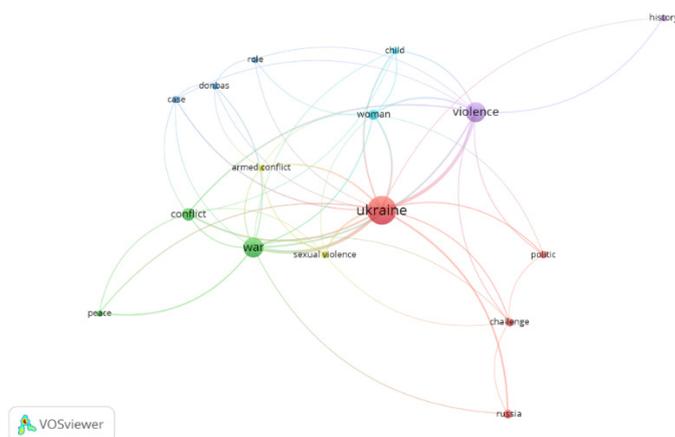
aplikasi VosViewer menunjukkan bahwa kajian mengenai kekerasan di Ukraina berpusat pada topik perang dan kekerasan.

Pasca pandemi COVID-19 dan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, organisasi masyarakat sipil diakui memainkan peran vital dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Ukraina. Penilaian ini diperkuat melalui studi Proyek COVAW yang didirikan pada tahun 2022, dengan keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil Ukraina (Council of Europe, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa peran organisasi masyarakat sipil Ukraina menjadi krusial dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut.

Kerangka Teori

Studi ini menggunakan teori Transnational Advocacy Networks (TANs) dalam tulisan Nur Azizah (2014) didefinisikan sebagai jaringan kegiatan advokasi yang melibatkan aktivis dari dua negara atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau aktivis di suatu negara membentuk jaringan dengan aktivis di negara lain. TAN juga bisa melibatkan aktivis di satu negara membentuk jaringan dengan aktivis di negara lain (Azizah, 2014). Kontribusi aktor internasional dalam mengadvokasi isu tertentu dapat dilihat melalui penggunaan teori TANs sebagai alat analisis penelitian (Amalia & Azizah, 2019).

Penelitian terbaru tentang aktivisme masyarakat sipil telah memberikan banyak perhatian pada jaringan aktivis transnasional (Transnational Activation Network - TAN) dalam konteks dunia yang semakin mengglobal, di mana



Gambar 1. Topik Penelitian mengenai Kekerasan di Ukraina

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan VosViewer (2024)

pengaruh politik dapat menyebar melintasi batas negara. Jaringan aktivis transnasional terdiri dari banyak organisasi nonpemerintah, organisasi internasional, pemerintah, bahkan akademisi dan media (Carpenter, 2007). Penelitian tentang TAN dapat dikatakan berlangsung dengan cukup baru, dan tujuannya adalah untuk melihat bagaimana jaringan advokat transnasional bekerja sama untuk mengubah kebijakan dengan cara yang sistematis (Mukherjee, 2017).

Taktik advokasi dikategorikan oleh Keck and Sikkink (1999) ke dalam kategori strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* (Azizah, 2014; Keck & Sikkink, 1999) yang mana, masing-masing taktik dimaknai sebagai:

- a. Strategi *information politics* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas, dan menambahkan unsur drama pada fakta melalui kesaksian korban dan sarana lainnya untuk menarik perhatian.
- b. Strategi *symbolic politics* terdiri dari memperhatikan penyebab yang diperjuangkan dengan mengadakan upacara, peringatan peristiwa, atau hari-hari khusus yang berkaitan dengan topik yang diperjuangkan untuk menarik perhatian orang.
- c. Strategi *leverage politics* adalah strategi yang bertujuan untuk mengungkit atau mengkaitkan isu-isu yang sekarang sedang diperjuangkan dengan kepentingan prestise negara. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan ini akan bergantung pada pengaruh organisasi seperti Bank Dunia, IMF, dan lain-lain.
- d. Strategi *accountability politics* merupakan cara yang digunakan untuk terus menerus mengingatkan pemerintah bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana organisasi masyarakat sipil Ukraina melakukan strategi advokasi pada isu kekerasan terhadap perempuan serta kekerasan domestik di Ukraina dengan menggunakan perspektif teori TAN dari Keck and Sikkink.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber

data sekunder, termasuk buku, jurnal, berita, dan laporan yang diterbitkan oleh organisasi masyarakat sipil Ukraina. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria relevansi terhadap topik penelitian, khususnya kekerasan terhadap perempuan di Ukraina dan proyek COVAW. Selain itu, metode penelitian kepustakaan atau *library research* juga digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Metode kepustakaan melibatkan pencarian, membaca, mencatat, dan meninjau berbagai referensi dan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Objek penelitian adalah pada organisasi masyarakat sipil Ukraina, dengan penekanan pada strategi-strategi yang diterapkan dalam kerangka proyek COVAW.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yang jika ditinjau dari tulisan Sugiyono (2022) di mana teknik analisis deskriptif menekankan bahwa teknik analisis data harus difokuskan pada usaha menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendalam memahami makna objek penelitian dan proses situasi sosial secara komprehensif (Sugiyono, 2022). Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk pemilihan data yang relevan yang terkait secara langsung dengan fokus penelitian. Data-data yang dipilah ialah data yang memiliki kriteria yang sesuai penelitian, yakni berupa sumber data sekunder yang membahas maupun mengkaji isu kekerasan terhadap perempuan di Ukraina atau dan proyek COVAW. Lebih lanjut, dilakukan pengorganisasian data, penjabaran, pemilihan data yang signifikan, dan pembuatan kesimpulan pada akhir penelitian (Sugiyono, 2022).

Hasil

Konvensi Istanbul sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Domestik terhadap Perempuan

Konvensi Istanbul diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa pada 7 April 2011 dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2014. Saat ini Konvensi Istanbul telah diratifikasi oleh sebanyak 37 negara (Council of Europe, n.d.-a). Konvensi Istanbul muncul sebagai hasil dari upaya Dewan Uni Eropa untuk memantau kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, mengidentifikasi kesenjangan legislatif, dan mengidentifikasi praktik terbaik

yang mencakup berbagai tindakan, termasuk berbagai kewajiban, mulai dari peningkatan kesadaran dan pengumpulan data hingga tindakan hukum tentang kriminalisasi, serta berbagai bentuk kekerasan (Jurvise et al., 2020).

Konvensi Istanbul sendiri dinilai menjadi salah satu konvensi krusial, khususnya bagi perkembangan dalam gerakan memerangi kekerasan berbasis gender, dimana Konvensi Istanbul menetapkan standar baru yang mengikat secara hukum (Mcquigg, 2017). Dapat dikatakan, terdapat dua tujuan utama yang ingin diraih pada Konvensi Istanbul, yakni: dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan dan promosi atas kesetaraan substantif antara perempuan dan laki-laki (Kamga, 2020).

Survey menunjukkan bahwa, kekerasan terhadap perempuan di kawasan Uni Eropa telah terjadi kepada 13 juta perempuan, atau sekitar 7% perempuan berusia antara 18 dan 74 tahun, dimana mereka telah dilecehkan secara fisik pada tahun sebelum survei. Selain itu, satu dari setiap tiga wanita (33%) telah terluka secara fisik atau seksual sejak dia berusia 15 tahun (Jurasz, 2015). Keadaan memprihatinkan ini menjadi faktor pendorong terbesar atas diperlukannya peningkatan yang lebih baik terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Eropa.

Sebelum Konvensi Istanbul, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, juga dikenal sebagai "Konvensi Perempuan") (1979) sebagai bentuk penolakan atas kekerasan yang terjadi pada perempuan. Pasal 2 dari konvensi CEDAW mengatakan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah ilegal. Namun, CEDAW tidak mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender, serta tidak juga mewajibkan anggota CEDAW untuk melarang, mencegah, dan menghukum tindakan kekerasan tersebut (Jurasz, 2015). Selain itu, CEDAW juga tidak membahas masalah kekerasan, yang mana konvensi ini tidak memaparkan lebih lanjut mengenai hubungan antara kekerasan dan ketidaksetaraan perempuan (Guney, 2020).

Kemudian, hadirnya Konvensi Belém do Pará (1994) yang merupakan konvensi tingkat regional asal Amerika Serikat, menjadi satu-satunya konvensi yang mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan

salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hanya konvensi inilah yang dapat mengikat secara hukum. Konvensi lainnya, hanya berupa instrumen "*soft law*" yang menunjukkan kesepakatan politik dan aspirasional antar negara, sehingga negara tidak harus mengikutinya. Konvensi ataupun instrumen lainnya ini hanya dapat ditegakkan melalui tekanan politik, bukan melalui sistem yang membuat negara bertanggung jawab secara hukum. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan diskriminatif hanya dilakukan dalam dokumen-dokumen PBB yang tidak mengikat secara hukum. Baru setelah dua dekade berikutnya setelah lahirnya Konvensi Belém do Pará, lahirlah Konvensi Istanbul yang kemudian menempatkan pendekatan "diskriminasi" terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada dasar hukum yang kuat sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum (Guney, 2020; Jurasz, 2015).

Konvensi Istanbul memiliki pasal-pasal yang bertujuan untuk mewujudkan adanya kebijakan "zero-tolerance" untuk kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh budaya, agama, atau tradisi. Hal ini menjadi landasan kuat untuk menghentikan dan melindungi kekerasan terhadap perempuan lebih lanjut (Jurasz, 2015; Resdifianti et al., 2022). Selain itu, Konvensi Istanbul juga melahirkan kewajiban bagi negara yang bergabung dengan konvensi tersebut untuk menyediakan layanan perlindungan dan dukungan untuk menanggapi kekerasan terhadap perempuan, seperti: jumlah tempat penampungan yang memadai, pusat krisis pemerkosaan gratis, konseling psikologis, dan perawatan medis untuk penyintas kekerasan. Konvensi Istanbul juga meminta pihak berwenang untuk memastikan pendidikan tentang kesetaraan gender, seksualitas, dan hubungan yang sehat (Amnesty International, 2021).

Lisa Grans (2018) dalam jurnalnya yang berjudul "The Istanbul Convention and the Positive Obligation to Prevent Violence" menyatakan hadirnya Konvensi Istanbul menjadi satu langkah positif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Argumennya adalah, gagasan bahwa negara harus mengambil langkah umum seperti tindakan pencegahan acak dalam skala besar untuk menghentikan suatu pola kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan hal yang tidak relevan untuk

dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi perhatian Konvensi Istanbul. Dengan menyetujui Konvensi Istanbul, maka negara harus mengumpulkan data dan membantu pendanaan penelitian tentang semua jenis kekerasan yang dicakupnya. Hal ini merupakan bentuk upaya yang harus segera dilakukan untuk menghentikan praktek-praktek yang tidak adil bagi perempuan (Grans, 2018).

Selain itu, menurutnya, informasi mengenai hukuman atas kekerasan terhadap perempuan memang diperlukan, namun, hal informasi tidaklah cukup untuk menghentikan kekerasan secara kontinu. Langkah-langkah operasional (seperti perintah penahanan) yang membuat jarak antara calon penyerang menurutnya bukanlah solusi jangka panjang. Diperlukan raising awareness lebih lanjut atas hal ini, dimana perlu ada upaya untuk mengubah pikiran orang-orang yang melakukan kekerasan dan orang-orang yang mungkin melakukan kekerasan. Hal ini telah ditekankan dalam pasal-pasal Konvensi Istanbul. Konvensi mengatakan bahwa salah satu hal terpenting yang harus dilakukan untuk “mencegah” kekerasan terhadap perempuan adalah “mempromosikan perubahan dalam pola perilaku sosial dan budaya perempuan dan laki-laki” yang didasarkan pada gagasan bahwa perempuan kurang penting dibandingkan laki-laki (Guney, 2020).

Prasangka, stereotip, dan kebiasaan atau tradisi berbasis gender sering membentuk bagaimana perempuan dan laki-laki bertindak sekarang, dan selama anggota negara tidak mencoba mengubah mentalitas dan sikap ini, maka kekerasan berbasis gender tidak mungkin dapat dihentikan. Konvensi Istanbul juga menegaskan bahwa negara tidak dapat menggunakan budaya, agama, tradisi, atau apa yang disebut “kehormatan” untuk membenarkan setiap tindakan kekerasan yang tercakup dalam Konvensi Istanbul. Dalam hal ini, Konvensi Istanbul menurutnya akan melahirkan satu pijakan baru pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, karena konvensi tersebut memuat definisi pencegahan yang lebih luas (Grans, 2018).

Konvensi Istanbul memberikan definisi kekerasan yang luas. Konvensi Istanbul tidak hanya memaparkan secara berbeda tentang kekerasan domestik dan kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga membuat perbedaan yang jelas di antara keduanya. Kekerasan

dalam rumah tangga atau kekerasan domestik didefinisikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dimana perempuan lebih rentan terkena dampaknya jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun, Konvensi Istanbul dapat digunakan pula untuk membantu semua korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk laki-laki dan anak laki-laki, hanya saja negara yang meratifikasi Konvensi Istanbul tidak diwajibkan untuk melakukannya (Grans, 2018).

Konvensi Istanbul memperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang didasarkan pada gender, dan menempatkan perempuan korban sebagai inti dalam menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai studi juga menegaskan bahwa, kekerasan yang dialami oleh perempuan sering kali berdasar pada isu-isu ketidaksetaraan pada budaya patriarki sehingga disebut dengan kekerasan berbasis gender (Suswandari & Corliana, 2013; Suswandari et al., 2022; Tonsing & Tonsing, 2019). Kemudian, pembukaan Konvensi Istanbul juga menekankan bahwa kekerasan berbasis struktural serta berbasis gender adalah “salah satu mekanisme sosial terpenting yang memaksa perempuan untuk tunduk pada laki-laki”. Konvensi Istanbul secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan dan ketidaksetaraan adalah dua hal yang saling melengkapi, yang mana, kedua hal tersebut menjadi akar atas terjadi kekerasan terhadap perempuan (Guney, 2020). Kemudian, kekerasan terhadap perempuan diperburuk oleh perbedaan yang terjadi diantara perempuan dan laki-laki.

Gizem Guney (2020) menuliskan dengan komprehensif bagaimana Konvensi Istanbul dapat menjelaskan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi. Menurutnya, Konvensi Istanbul telah mengakui bahwa kekerasan adalah masalah struktural yang dialami perempuan secara tidak proporsional sebagai sebuah kelompok, ketimbang melihatnya sebagai serangkaian insiden kekerasan individual yang dapat ditangani. Disamping itu, instrumen hukum HAM regional di Eropa tidak pernah membuat penegasan ini mengikat secara hukum, sehingga kekerasan dalam rumah tangga masih dilihat sebagai masalah pribadi bukan masalah struktural, politik, dan gender (Guney, 2020).

Guney juga berpendapat bahwa Konvensi Istanbul menegaskan hubungan yang kuat

antara kekerasan dan ketidaksetaraan atas posisi perempuan pada semua bidang kehidupan, tidak hanya mengenai ketidaksetaraan hukum tetapi juga sosial ekonomi dan budaya. Konvensi ini bertujuan untuk berkontribusi pada kesetaraan perempuan secara umum, di luar konteks kekerasan. Penting bagi negara untuk menyatakan penentangan atas seluruh jenis diskriminasi terhadap perempuan, baik yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan atau tidak (Guney, 2020).

Dalam hal pencegahan kekerasan, dapat dikatakan bahwa Konvensi Istanbul mengambil pendekatan radikal dengan mewajibkan negara-negara untuk menghilangkan akar penyebab kekerasan, yaitu perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, bukan hanya memperlakukannya sebagai masalah hukum dan ketertiban (Guney, 2020). Atas alasan-alasan di atas pula lah, Dewan Uni Eropa mengklaim bahwa Konvensi Istanbul berbeda dengan perjanjian internasional lainnya yang menangani kekerasan berbasis gender, karena secara khusus, Konvensi Istanbul menetapkan pelaksanaan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi antara lembaga nasional dan pemerintah yang terlibat dalam tindakan pencegahan, penuntutan, dan perlindungan (Jurvise et al., 2020). Dewan Uni Eropa memang telah mengupayakan ratifikasi Konvensi Istanbul di Ukraina melalui proyek yang dinamai dengan "The Istanbul Convention: A Tool To Advance In Fighting Violence Against Women And Domestic Violence In Ukraine". Dalam proyek tersebut, Dewan Uni Eropa menggandeng berbagai lembaga negara, *non governmental organizations*, organisasi internasional, serta donor dalam rangka menangani pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara strategis dan jangka panjang di Ukraina (Council of Europe, n.d.-c).

Sebagai bentuk lanjutan proyek tersebut, Dewan Uni Eropa kemudian membuat proyek lanjutan ratifikasi Konvensi Istanbul yang dikenal dengan Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW). Proyek ini memiliki beberapa tujuan, yang mana semua tujuan tersebut berujung pada upaya untuk memerangi kekerasan seksual serta kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Tujuan-tujuan itu berupa (Council of Europe, n.d.-b):

a. Adopsi undang-undang yang sesuai untuk ratifikasi Konvensi Istanbul yang bekerja

sama dengan Komite Verkhovna Rada yang relevan;

- b. Kesadaran yang lebih besar terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina dan kebutuhan untuk melawannya di antara otoritas di berbagai tingkatan; penyebaran informasi tentang Konvensi Istanbul dan norma internasional lainnya di bidang ini;
- c. Mendidik masyarakat untuk menentang stereotip dan ketidaksetaraan gender, bahaya kekerasan dalam rumah tangga, dan aturan internasional untuk memberantasnya, seperti Konvensi Istanbul;
- d. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para profesional dan pemangku kepentingan utama, terutama dalam komunitas gabungan tertentu;
- e. Identifikasi kesenjangan yang menghambat pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan korban kekerasan tersebut, penuntutan pelaku, atau pelaksanaan kebijakan terpadu pusat atau daerah, dan;
- f. Reformasi legislatif dan perbaikan kebijakan untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan, ratifikasi serta adopsi undang-undang maupun norma dari Konvensi Istanbul menjadi poin penting yang ingin diraih sebagai output dari proyek COVAW. Penelitian ini akan fokus membahas strategi yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil Ukraina terhadap suksesi COVAW. Mengingat, COVAW sendiri dilakukan sebagai bentuk kerja sama antar Dewan Uni Eropa bersama beberapa badan lain, yang mana salah satunya ialah Organisasi Masyarakat Sipil Ukraina.

Diskusi

Penelitian ini mengungkap strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil ukraina yakni berupa JurFem, La Strada-Ukraine, Centre of Women's Perspectives, Faith, Hope, Love melalui taktik advokasi dari teori Transnational Advocacy Networks (TAN) dari Keck and Sikkink. Teori TAN digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi organisasi masyarakat sipil Ukraina yang digandeng oleh Dewan Uni Eropa untuk menyukseskan proyek COVAW.

Organisasi pertama ialah Asosiasi Pengacara Wanita Ukraina "JurFem" (Ukrainian Women Lawyers Association "JurFem") yang mana merupakan salah satu asosiasi pengacara wanita Ukraina pertama. JurFem hadir dengan tujuan utama untuk memfasilitasi wadah pertukaran pengalaman, pengembangan dan dukungan perempuan dalam profesi hukum (JurFem, n.d.). Selama COVAW berlangsung, JurFem secara eksklusif melakukan penelitian mengenai informasi tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina selama paruh pertama tahun 2022 dan menemukan tren tentang pengaruh perang terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina. Data yang ditemukan JurFem menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat pada Juni 2022 dibandingkan dengan Maret 2022. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya konflik yang terjadi di bagian negara Ukraina (Analytical Center JurFem & Council of Europe, 2022). Data dari JurFem juga menemukan bahwa, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan pelakunya adalah laki-laki.

Kemudian, La Strada-Ukraine, merupakan *non governmental organization* dengan fokus hak asasi manusia publik. NGO ini berupaya untuk memastikan kesetaraan gender, membangun perdamaian, mencegah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, memerangi perdagangan manusia, melindungi hak anak, dan mempromosikan standar hak asasi manusia di semua bagian masyarakat dan negara. Sejak invasi Rusia ke Ukraina terjadi, La Strada bertindak secara aktif, khususnya dalam melakukan kampanye informasi terkait kekerasan seksual dan kekerasan domestik yang menimpa perempuan dan anak-anak Ukraina (La Strada Ukraine, n.d.).

Selanjutnya ialah Centre of Women's Perspectives didirikan pada tanggal 6 April 1998. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan hak-hak perempuan dan mendukung kesetaraan hak dan kemungkinan perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan, dengan agenda yang bertujuan untuk menerapkan kebijakan gender di Ukraina, memerangi kekerasan melawan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan daya saing perempuan di pasar tenaga kerja, mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di

Ukraina (Centre of Women's Perspectives, n.d.). Saat meletusnya konflik Ukraina dan Russia pada 2022 lalu, Centre of Women's Perspectives kemudian banyak bergerak untuk merespon situasi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di tempat penampungan yang menampung pengungsi.

Organisasi terakhir yang ikut terlibat dalam proyek COVAW ialah Faith, Hope, Love (FHL) yang didirikan pada tahun 1996. FHL merupakan salah satu organisasi nirlaba pertama yang memulai proyek untuk membantu orang banyak. Tujuan utama FHL adalah untuk membantu pertumbuhan masyarakat sipil, reformasi ekonomi, politik, dan sosial di Ukraina agar dapat berdampak pada pembuatan kebijakan (*decision-making*), perlindungan hak dan kebebasan, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Sejak terjadinya invasi militer yang menyebabkan krisis masyarakat di Ukraina, FHL telah sepenuhnya bertransformasi. FHL mengklaim bahwa proyek yang dilakukan lebih difokuskan terhadap masyarakat Ukraina yang terkena dampak perang, melalui pemberian bantuan kemanusiaan, dukungan sosial, dan bantuan psikologis (GlobalGiving, n.d.).

Berbagai organisasi masyarakat sipil Ukraina tersebut kemudian juga menjalankan proyek COVAW bersama dengan Dewan Uni Eropa melalui kegiatan advokasi dengan menggunakan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, seperti:

- a. Strategi *information politics* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, "JurFem" berkontribusi untuk memperkuat respons terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama konflik dan meningkatkan pengetahuan tentang masalah kontemporer di bidang ini di kalangan profesional dan masyarakat umum di Ukraina. JurFem juga mengumpulkan informasi tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina selama paruh pertama tahun 2022 dan menemukan tren tentang pengaruh perang terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Ukraina. Selain itu, organisasi Faith, Hope, Love juga menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran

tentang perdagangan manusia di kalangan perempuan yang berpindah di wilayah perbatasan, serta mendidik pengungsi dan masyarakat umum tentang cara mengajukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir, La Strada Ukraina juga melakukan kampanye informasi untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan menggunakan media sosial, yang menjangkau lebih dari 7.000 orang di Ukraina. Disisi lain, penyebaran informasi dalam bentuk lainnya, seperti pelatihan terhadap situasi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di tempat penampungan yang menampung pengungsi juga telah dilakukan oleh Center of Women's Perspectives. Terakhir, La Strada mengembangkan 3.000 kartu informasi untuk korban kekerasan terhadap perempuan (Council of Europe, 2022).

- b. Strategi *symbolic politics* terdiri dari memperhatikan penyebab yang diperjuangkan dengan mengadakan upacara, peringatan peristiwa, atau hari-hari khusus yang berkaitan dengan topik yang diperjuangkan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Dalam hal ini, Dewan Uni Eropa bersama dengan seluruh aktor yang mendukung proyek COVAW menyambut hari Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional (International Day for the Elimination of Violence Against Women) pada 25 November lalu melalui dengan memberikan statemen resmi yang berisi penegasan kembali atas komitmennya untuk membela hak-hak perempuan dan anak perempuan di Ukraina, agar seluruh masyarakat Ukraina hidup bebas dari kekerasan berbasis gender dan semua bentuk kekerasan. Statemen ini juga diikuti dengan diberikannya slogan berupa, "From awareness to accountability: END GENDER BASED VIOLENCE NOW!" (Marija Pejčinović Burić & Council Of Europe, 2022).
- c. Strategi *leverage politics* adalah strategi yang bertujuan untuk mengungkit atau mengkaitkan isu-isu yang sekarang sedang diperjuangkan. Dalam hal ini, La Strada Ukraina telah menjadi tuan rumah atas tiga pembicaraan online untuk jaksa, polisi, hakim, pengacara, pekerja sosial, dan anggota organisasi publik tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Dewan

Uni Eropa, melalui Sekretaris Jenderal, telah membicarakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi semenjak invasi terjadi di Ukraina melalui statement resmi (Council Of Europe, 2022b).

- d. Strategi *accountability politics* merupakan cara yang digunakan untuk terus menerus mengingatkan pemerintah bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Dalam hal ini, JurFem membuat rekomendasi bagi otoritas negara untuk memperkuat respons mereka terhadap insiden kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan temuan data kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan Ukraina (Council of Europe, 2022).

Konflik yang terjadi di Ukraina selama kurang lebih setahun kebelakang menyebabkan banyak dampak serius, khususnya bagi masyarakat Ukraina. Dalam hal ini, kekerasan domestik serta kekerasan seksual menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Dorongan yang diberikan oleh Dewan Uni Eropa beserta organisasi masyarakat sipil Ukraina terhadap Pemerintah Ukraina untuk meratifikasi Konvensi Istanbul dilakukan dengan serius, khususnya setelah konflik pecah. Secara eksplisit, Konvensi Istanbul memberlakukan regulasinya dalam situasi apapun; baik damai ataupun konflik bersenjata.

Dapat dikatakan, konvensi melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata dengan menggabungkan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional. Juga diketahui bahwa ada kaitan antara kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama konflik bersenjata dan fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak yang sama dan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi sebelum konflik. Dengan cara ini, konvensi memastikan bahwa negara terus memenuhi kewajibannya terkait dengan kekerasan yang terjadi selama masa konflik internal, konflik bersenjata, dan setelah konflik, ketika kekerasan berbasis gender masih sering terjadi (Jurasz, 2015).

Jurasz (2015) berpendapat bahwa, meskipun Konvensi Istanbul bukanlah pengganti aturan hukum humaniter internasional tentang perlindungan perempuan dalam

konflik bersenjata, Konvensi Istanbul dapat digunakan sebagai pelengkap untuk menjaga perempuan dan anak perempuan agar dapat aman dari kekerasan dan menghentikan para pelaku kekerasan yang agar tidak lolos. Secara khusus, konvensi dapat diberlakukan di luar perbatasannya, seperti ketika kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh angkatan bersenjata salah satu pihak Konvensi atau di wilayah yang secara efektif dikendalikan oleh pihak tersebut (Jurasz, 2015). Data dari berbagai macam studi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Ukraina menunjukkan bahwa, konflik yang terjadi di Ukraina saat ini memiliki pengaruh besar atas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Ukraina. Maka dari itu, ratifikasi dan implementasi Konvensi Istanbul pada hukum Ukraina sangat diperlukan.

Ukraina sendiri telah meratifikasi Konvensi Istanbul pada bulan Juli 2022 lalu (Council of Europe, 2022a). Ratifikasi Konvensi Istanbul menjadi langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Ukraina dalam memperbaiki sekaligus meningkatkan upayanya dalam melawan kekerasan terhadap perempuan sekaligus kekerasan domestik yang menimpa perempuan di Ukraina. Selain itu, ratifikasi Konvensi Istanbul merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari proyek COVAW. Dengan ini, maka dapat dikatakan proyek COVAW telah berhasil berjalan. Tidak hanya itu, melalui berbagai macam strategi advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Ukraina, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun meraih atensi masyarakat internasional telah dilakukan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dalam menanggulangi isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan domestik di Ukraina selama tahun 2022, Dewan Uni Eropa secara khusus membentuk proyek Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW), dengan menggandeng berbagai aktor. Salah satu aktor non pemerintah yang digandeng dalam proyek ini ialah organisasi masyarakat sipil Ukraina. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil tersebut terdiri dari JurFem, La Strada-Ukraine, Centre of Women's Perspectives, Faith, Hope, Love yang mana kemudian terlibat aktif dalam proyek COVAW dan melakukan berbagai macam upaya advokasi terhadap isu tersebut.

Dengan menggunakan kerangka teori Transnational Advocacy Networks (TANs) dari Kick dan Sikkink, penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat taktik advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Ukraina dalam menanggulangi isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan domestik yang terjadi di Ukraina. Isu-isu menjadi isu penting yang kemudian dibawa oleh Dewan Uni Eropa untuk dihentikan melalui proyek yang dinamai dengan Combating Violence Against Women in Ukraine (COVAW) pada awal tahun 2022 lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, organisasi masyarakat sipil cenderung lebih dominan melakukan banyak aktifitas penyebaran informasi atau information politics terhadap isu kekerasan pada perempuan serta kekerasan domestik yang terjadi pada perempuan Ukraina kepada masyarakat luas. Hal ini juga selaras dengan tujuan utama proyek COVAW itu sendiri, yakni untuk meningkatkan awareness atas isu kekerasan itu sendiri.

Meskipun telah berhasil mendorong Pemerintahan Ukraina untuk meratifikasi Konvensi Istanbul, yang merupakan tujuan utama dari proyek COVAW, penelitian ini belum dapat menjelaskan bagaimana implementasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Ukraina pada hukum nasionalnya pasca ratifikasi Konvensi Istanbul. Maka dari itu, tentu diperlukan penelitian lanjutan mengenai hal tersebut.

Referensi

- Amalia, N. R., & Azizah, N. (2019). Toward Political Change: Transnational Advocacy Network for Gendercide Issue in the People's Republic of China. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81146>
- Amnesty International. (2020). *Ukraine: Epidemic of violence against women in conflict-torn east*. Amnesty International. [ukraine: Epidemic of violence against women in conflict-torn east](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/heres-why-the-istanbul-convention-saves-lives/)
- Amnesty International. (2021). *Here's why the Istanbul Convention Saves Lives*. Wwww. Amnesty.Org. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/heres-why-the-istanbul-convention-saves-lives/>
- Analytical Center JurFem, & Council of Europe. (2022). *Domestic Violence In Ukraine: Response During The War First Half of 2022*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

- Azizah, N. (2014). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. In *LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. LP3M UMY.
- Carpenter, R. C. (2007). Setting the advocacy agenda: Theorizing issue emergence and nonemergence in transnational advocacy networks. *International Studies Quarterly*, 51(1), 99–120. https://doi.org/10.1111/J.1468-2478.2007.00441.X/2/ISQU_441_F2.JPG
- Centre of Women's Perspectives. (n.d.). *Жіночі перспективи / About us, Non-Governmental Centre "Women's Perspectives."* [Http://www.women.lviv.ua/](http://www.women.lviv.ua/). Retrieved January 17, 2023, from <http://www.women.lviv.ua/en/about-us/>
- Council of Europe. (n.d.-a). *Chart of signatures and ratifications of Treaty 210*. Council of Europe. Retrieved January 15, 2023, from <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty=210>
- Council of Europe. (n.d.-b). *Combating Violence against Women in Ukraine (COVAW) - Council of Europe Office in Ukraine*. Council of Europe. Retrieved January 13, 2023, from <https://www.coe.int/en/web/kyiv/combating-violence-against-women-in-ukraine-covaw-%7B%2290288181%22%3A%5B%7D>
- Council of Europe. (n.d.-c). *The Istanbul Convention: a tool to advance in fighting violence against women and domestic violence in Ukraine - Council of Europe Office in Ukraine*. www.coe.int. Retrieved January 13, 2023, from <https://www.coe.int/en/web/kyiv/the-istanbul-convention-a-tool-to-advance-in-fighting-violence-against-women-and-domestic-violence-in-ukraine-%7B%2243471198%22%3A%5B%7D>
- Council of Europe. (2022, November 7). *Ukrainian civil society organisations provide vital support to women during war - Council of Europe Office in Ukraine*. www.coe.int. <https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ukrainian-civil-society-organisations-provide-vital-support-to-women-during-war>
- Council Of Europe. (2022a, July 18). *Ukraine ratifies the Istanbul Convention - Council of Europe Office in Ukraine*. www.coe.int. <https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ukraine-ratifies-the-istanbul-convention>
- Council Of Europe. (2022b, November 25). *"From awareness to accountability: END GENDER BASED VIOLENCE NOW!" - Council of Europe Office in Ukraine*. www.coe.int. <https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/from-awareness-to-accountability-end-gender-based-violence-now->
- GlobalGiving. (n.d.). *Public Movement Faith, Hope, Love*. www.globalgiving.org. Retrieved January 17, 2023, from <https://www.globalgiving.org/donate/98107/public-movement-faith-hope-love/>
- Grans, L. (2018). The Istanbul convention and the positive obligation to prevent violence. *Human Rights Law Review*, 18(1), 133–155. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngx041>
- Guney, G. (2020). The Istanbul Convention: A Genuine Confirmation of the Structural Nature of Domestic Violence against Women within a Human Rights Law Framework? In S. Kewley & B. Charlotte (Eds.), *Preventing Sexual Violence Problems and Possibilities*. Bristol University Press.
- Jurasz, O. (2015). The Istanbul Convention: a new chapter in preventing and combating violence against women *Journal. Australian Law Journal*, 9(89), 619–627. <https://doi.org/10.5860/choice.51-2973>
- Jurfem. (n.d.). *About us - Jurfem*. jurfem.com.ua. Retrieved January 17, 2023, from <https://jurfem.com.ua/en/about-us-eng/>
- Jurvisse, U., Shreeves, R., & Members' Research Service. (2020). The Istanbul Convention : A tool to tackle violence against women and girls. *European Parliamentary Research Service, November*, 1–4. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608814/EPRS_ATA\(2017\)608814_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608814/EPRS_ATA(2017)608814_EN.pdf)
- Kamga, S. D. (2020). International law and violence against women. In *Pan Africanism, Regional Integration and Development in Africa*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34296-8_17
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>
- La Strada Ukraine. (n.d.). *La Strada Ukraine - La Strada International*. Retrieved January 17, 2023, from <https://www.lastradainternational.org/la-strada-ukraine/>

- Marija Pejčinović Burić, & Council Of Europe. (2022, November 24). *Ukraine: We must help victims of sexual violence by Russian soldiers - Council of Europe Office in Ukraine*. Wwww.Coe.Int. <https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ukraine-we-must-help-victims-of-sexual-violence-by-russian-soldiers>
- Mcquigg, R. J. A. (2017). *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*. Routledge.
- Mukherjee, A. (2017). Global Regime on Tobacco Control?: The Role of Transnational Advocacy Networks. *Journal of Management Policy and Practice*, 18(2), 38–46.
- Resdifianti, F., Nurkhasanah, D. S., & ... (2022). Tuntutan Masyarakat Terhadap Keluarnya Turki Dari Konvensi Istanbul. *Indonesian Journal of ...*, 6(2), 133–154. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.302>
- Suswandari, & Corliana, T. (2013). *Resistensi Perempuan Terhadap Praktik Ideologi Patriarkhi: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial*. Ghaniya Publisher.
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 161–175. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39511>
- Tonsing, J. C., & Tonsing, K. N. (2019). Understanding the role of patriarchal ideology in intimate partner violence among South Asian women in Hong Kong. *International Social Work*, 62(1), 161–171. <https://doi.org/10.1177/0020872817712566>
- Zorgdrager, H. (2020). Churches, dignity, gender: The Istanbul convention as a matter of public theology in Ukraine. *International Journal of Public Theology*, 14(3), 296–318. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341621>